

BAB II

BHUTAN DAN GEOPOLITIK KAWASAN ASIA SELATAN

Bab ini membahas posisi strategis Bhutan dalam konteks geopolitik Asia Selatan, khususnya terkait sengketa wilayah perbatasan Doklam yang melibatkan Bhutan, Tiongkok, dan India. Menurut penulis, tulisan ini penting untuk dibahas karena Bhutan merupakan negara kecil yang terjepit di antara dua kekuatan besar yaitu Tiongkok dan India, yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Asia Selatan. Sengketa di wilayah doklam menjadi salah satu contoh nyata bagaimana faktor geografi menjadi tantangan bagi negara kecil Bhutan dalam memelihara perdamaian dan kedaulatan nasional.

Kebuntuan militer di kawasan Doklam pada tahun 2017 menempatkan Bhutan dalam posisi diplomatik yang sulit. Oleh karena itu, bab ini bertujuan untuk memahami bagaimana kondisi geografis, dinamika geopolitik, dan norma-norma Buddhis membentuk sikap dan kebijakan luar negeri Bhutan dalam menghadapi konflik tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembahasan dalam bab ini akan di susun dengan sistematika berikut. Bagian pertama akan membahas peran Buddhisme Vajrayana dalam kehidupan sosial dan budaya Bhutan. Bagian kedua akan menjelaskan Letak Geografis dan Signifikansi Strategis Bhutan. Bagian ketiga akan membahas tentang Tatanan Geopolitik Asia Selatan, khususnya dalam interaksi hubungan India, Tiongkok, dan Bhutan. Bagian yang terakhir membahas tentang Sengketa Doklam, baik dalam kronologi, aktor yang terlibat dan kepentingan di dalamnya.

2.1 Buddhisme dalam Masyarakat Bhutan

Bhutan adalah kerajaan kecil di Himalaya yang terletak di antara Tiongkok dan India. Temuan arkeologis menunjukkan bahwa wilayah ini telah dihuni sejak sekitar tahun 2000 Sebelum Masehi, namun catatan sejarah Bhutan baru dimulai pada abad ke-8 Masehi ketika ajaran Buddha mulai masuk. Pada tahun 747 Masehi, seorang tokoh Buddha yaitu Padmasambhava atau dikenal juga sebagai Guru Rimpoche, memperkenalkan Buddhisme ke Bhutan. Sejak saat itu, ajaran Buddha memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial, budaya, dan politik negara tersebut. Pada abad ke-17, Zhabdrung Ngawang Namgyal berhasil mempersatukan Bhutan dan mendirikan sistem pemerintahan ganda, di mana *Je Khenpo* memimpin urusan keagamaan dan *Druk Desi* memimpin pemerintahan sipil. Sistem ini memberikan kestabilan politik serta memperkuat jati diri nasional Bhutan. Namun pada abad ke-18, sistem tersebut mulai melemah akibat konflik internal dan tekanan dari luar. Pada tahun 1907, Ugyen Wangchuck diangkat sebagai raja pertama Bhutan yang memerintah secara turun-temurun, menandai berawalnya era baru yang membawa perdamaian, stabilitas politik, dan modernisasi (Royal Bhutanese Embassy, 2016).

Dalam kehidupan masyarakat Bhutan, Buddhisme memegang peranan penting dan mewarnai berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ajaran-ajaran Buddha dijalankan oleh *Sangha*, yaitu komunitas praktisi Buddhis yang terorganisir dan berada di bawah kepemimpinan *Je Khenpo*, pemimpin spiritual tertinggi di Bhutan. *Sangha* tersebar di seluruh wilayah negara ini, dengan para bhikku dan bhikkuni yang menetap di biara-biara yang berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan

serta tempat praktik meditasi. Para bhikku dan bhikkuni tidak terbatas pada kehidupan monastik di dalam biara, tetapi juga aktif terlibat dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Bhutan yang cenderung mengaitkan hampir setiap peristiwa penting dalam hidup mereka dengan makna religius. Oleh karena itu, para anggota *Sangha* sering diundang ke rumah-rumah warga untuk memimpin berbagai upacara keagamaan, seperti dalam peristiwa kelahiran, pernikahan, sakit, kematian, pembangunan rumah, pelantikan pejabat pemerintah, peresmian acara, dan kegiatan lainnya (Dorje, 1990). Selain itu, masyarakat Bhutan menghidupi ajaran Buddha melalui berbagai praktik religius sehari-hari, seperti kunjungan rutin ke kuil dan biara untuk bermeditasi, mengamalkan ajaran Buddha dengan penggunaan bendera doa dan roda doa. Bendera doa merupakan kain persegi panjang berwarna-warni yang mencerminkan lima elemen alam, dicetak dengan mantra dan simbol suci. Masyarakat percaya bahwa doa yang tertulis di bendera dan dipasang di tempat yang tinggi akan tersebar melalui angin, membawa berkah dan kedamaian. Sementara itu, roda doa adalah silinder berisi gulungan mantra yang diputar searah jarum jam. Setiap putaran diyakini setara dengan melafalkan doa secara langsung. Pengaruh Buddhisme juga tampak dalam seni dan arsitektur tradisional Bhutan. Salah satu contohnya adalah bangunan *Dzong*, yang berfungsi sebagai benteng sekaligus pusat keagamaan dan administratif. Bangunan ini dibangun tanpa menggunakan paku, dan dihiasi dengan ukiran kayu serta lukisan yang merepresentasikan ajaran dan mitologi Buddha (AmenBhutan, 2024). Simbol Buddhis yang menghiasi ruang publik tersebut, berfungsi sebagai pengingat visual yang memperkuat kesadaran kolektif terhadap norma-norma spiritual dan sosial.

Integrasi Buddhisme ke dalam struktur politik nasional Bhutan ditunjukkan dengan adanya konsep *Gross National Happiness* (GNH) atau Kebahagiaan Nasional Bruto sebagai konsep indikator pembangunan negara. GNH menekankan pentingnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya serta spiritual yang berakar pada Buddhisme Vajrayana. Landasan ini membentuk pendekatan Bhutan dalam tata kelola pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan, sehingga setiap kebijakan pembangunan yang ada selalu sejalan dengan prinsip-prinsip spiritual. Tiga pilar utama dalam GNH yaitu pelestarian budaya, kelanjutan ekologi, dan tata kelola yang baik, mewujudkan norma Buddhisme Vajrayana yang menekankan pada harmoni, welas asih, dan keselarasan hidup. Pelestarian budaya dipadang sebagai upaya mempertahankan identitas spiritual bangsa, sementara perlindungan lingkungan didasarkan pada pandangan bahwa alam bersifat suci dan harus dijaga dalam hubungan harmonis dengan kehidupan manusia. Dalam aspek tata kelola, norma Buddhisme Vajrayana mendorong terciptanya kepemimpinan yang bijaksana berlandaskan welas asih. Ketiga pilar ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga membentuk fondasi kebijakan publik Bhutan (Givel, 2015).

2.2 Letak Geografis dan Signifikansi Strategis Bhutan

Bhutan merupakan salah satu negara kecil di dunia dengan luas sekitar 38,394 km² di wilayah pegunungan Himalaya, tepat di antara dua kekuatan besar, India dan Tiongkok. Posisinya geografisnya yang strategis memberikan dampak besar terhadap dinamika geopolitik di Asia Selatan, khususnya menjadikan Bhutan sebagai pusat

persaingan kepentingan strategis terutama terkait isu perbatasan dan keamanan regional (Carnegie India, 2024).

Secara geografis, Bhutan berbatasan langsung dengan Tiongkok di bagian utara dan India di bagian timur, selatan, dan barat. Di sepanjang perbatasan bagian utara Bhutan, terbentang pegunungan Himalaya. Selain itu, 72% wilayah Bhutan masih berupa hutan. Kombinasi pegunungan dan hutan, menciptakan tantangan tersendiri bagi Bhutan dalam pembangunan infrastruktur, terutama dalam aspek komunikasi, transportasi, dan logistik. Meskipun kondisi geografis tersebut membatasi akses antar daerah, namun di sisi lain pegunungan dan hutan memberikan perlindungan alami bagi Bhutan dari ancaman eksternal. Selanjutnya, wilayah lembah-lembah menjadi wilayah penting bagi pusat kehidupan masyarakat Bhutan. Salah satunya adalah Kota Thimphu, ibu kota negara, yang berfungsi sebagai pusat administratif, ekonomi dan logistik. Kota ini menjadi titik konektivitas nasional, yang menghubungkan berbagai wilayah Bhutan (Visit Bhutan, 2022).

Posisi Bhutan yang terletak di antara Tiongkok dan India, membawa keuntungan dan tantangan tersendiri. Sejak berdirinya Bhutan hingga saat ini, ia memiliki relasi dan perjanjian mitra strategis dengan India yang memberikan jaminan dalam hal ekonomi, bantuan militer, dan penjagaan keamanan nasional mengingat adanya potensi ancaman dari Tiongkok (Embassy of India Thimphu, t.t.). Di samping keuntungan tersebut, terdapat tantangan terkait keterbatasan kondisi geografis Bhutan. Wilayah pegunungan yang curam membuat negara ini sulit dijangkau oleh pasukan militer asing maupun oleh pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, walaupun memiliki mitra strategis Bhutan tetap

mempertahankan kebijakan luar negeri yang sangat berhati-hati, dengan mengedepankan prinsip non-intervensi dan menahan diri dalam konfrontasi regional.

Di tengah persaingan kekuatan besar Asia Selatan, yaitu India dan Tiongkok, mengharuskan Bhutan mengadopsi kebijakan luar negeri yang berhati-hati dan strategis. Bhutan secara konsisten menjaga hubungan baiknya dengan India sebagai mitra utama dalam hal ekonomi dan keamanan. Namun di sisi lain Bhutan juga mencoba untuk menjaga hubungan dengan Tiongkok, guna menghindari potensi ketegangan, mengingat kedua negara memiliki sengketa perbatasan yang belum terselesaikan (The Diplomat, 2024).

Salah satu contoh tantangan geopolitik yang dihadapi Bhutan adalah sengketa wilayah perbatasan di Doklam. Wilayah ini terletak di persimpangan perbatasan Bhutan, India, dan Tiongkok, yang berkembang menjadi kebuntuan militer pada tahun 2017. Konflik ini memperlihatkan bagaimana posisi geografis Bhutan yang terjepit diantara dua kekuatan besar dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dan keputusan diplomatiknya. Dengan mempertimbangkan letak geografisnya yang berada di antara dua kekuatan besar, Bhutan senantiasa mengarahkan kebijakan luar negerinya untuk membangun hubungan yang konstruktif dengan Tiongkok, tanpa mengorbankan kemitraannya yang erat dengan India (Kaul, 2022). Pendekatan ini mencerminkan komitmen Bhutan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik kawasan.

2.3 Tatanan Geopolitik Asia Selatan: India, Tiongkok, dan Bhutan

Asia Selatan adalah kawasan yang dipenuhi dengan dinamika dan tantangan geopolitik yang rumit, dimana negara kecil dan negara besar dengan kepentingannya yang beragam melakukan interaksi di wilayah ini. Dalam konteks Asia Selatan, interaksi India dan Tiongkok memainkan peran penting dalam menentukan stabilitas kawasan maupun dinamika politik dan ekonomi. Di tengah persaingan dua negara ini, Bhutan sebagai negara kecil harus mengarahkan hubungan diplomatiknya dengan sangat hati-hati untuk menjaga perdamaian dan stabilitas nasionalnya.

Sebagai negara dengan populasi terbesar kedua di dunia dan memiliki kekuatan ekonomi yang terus berkembang, India memainkan peran dominan di kawasan Asia Selatan. Pengaruh yang dimilikinya sangat besar dalam aspek politik, ekonomi, dan militer di tingkat regional (NUS, 2022). Sejauh ini, India telah berusaha untuk menjadi pemimpin kawasan Asia Selatan melalui kebijakan luar negeri yang mengutamakan stabilitas dan kerja sama regional, serta keterlibatan aktif dalam organisasi regional seperti SAARC (*South Asian Association fo Regional Cooperation*) (Times of India, 2023). Lebih lanjut, hubungan India dengan negara-negara di Asia Selatan, termasuk Bhutan, didasarkan pada prinsip-prinsip kedekatan geografis, sejarah, dan strategi geopolitik. India merupakan mitra utama Bhutan dalam bidang ekonomi dan pertahanan. Hubungan keduanya di ikat dengan perjanjian persahabatan yang dibentuk pada tahun 1949, yang menerangkan bahwa Bhutan akan mengikuti arahan dari India dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, meskipun Bhutan adalah negara yang berdaulat, India

memiliki pengaruh yang kuat atas kebijakan luar negeri Bhutan, terutama terkait dengan masalah keamanan dan hubungan perbatasan (Padmaja Murthy, 1999). Pada tahun 2007, kedua negara melakukan pembaruan terhadap perjanjian 1949. Pembaruan ini membuka era baru bagi hubungan keduanya, yang semula didasari oleh ketergantungan Bhutan, menjadi hubungan kemitraan yang setara (Nga dkk., 2019).

Transformasi ekonomi yang pesat sejak beberapa dekade, menjadikan Tiongkok sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia. Ekspansi ekonomi yang dilakukan Tiongkok tidak cukup bergerak hanya di kawasan domestiknya, tetapi juga meluas ke kawasan Asia Selatan dan negara-negara di sekitarnya. Salah satu proyek ekspansi Tiongkok adalah melalui BRI (*Belt and Road Initiative*). Dengan proyek ini, Tiongkok berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya di Asia Selatan melalui pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan investasi. Negara-negara di Asia Selatan yang bergabung dengan proyek BRI antara lain, Pakistan, Sri Lanka, Maladewa, dan Nepal (Bharti, 2023). Dalam hal ini, India sebagai kompetitor regional Tiongkok di kawasan Asia Selatan, secara tegas menolak partisipasi dalam proyek BRI dengan alasan bahwa inisiatif tersebut tidak menghormati kedaulatan dan integritas wilayah India (The Economic Times, 2023).

Dalam kerangka geopolitik Asia Selatan yang penuh dengan ketegangan antara India dan Tiongkok, Bhutan berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan kedua negara besar tersebut. Meskipun Bhutan secara historis lebih dekat dengan India, terutama dalam hal keamanan dan kebijakan luar negeri, namun Bhutan tetap berusaha menjaga hubungan terbuka dengan Tiongkok untuk menghindari

ketergantungan yang berlebihan kepada satu kekuatan besar saja (Mitra & Thaliyakkattil, 2018). Strategi kebijakan luar negeri Bhutan berlandaskan pada filosofi GNH (*Gross National Happiness*), sebuah konsep pembangunan yang menekankan pentingnya perdamaian, stabilitas, dan keberlanjutan. Melalui pendekatan ini, Bhutan mampu mengelola hubungannya dengan India dan Tiongkok secara hati-hati dan bijaksana, guna menjaga kepentingan nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip perdamaian, kesejahteraan dan kedaulatan (OPHI, n.d).

2.4 Sengketa Doklam: Kronologi, Aktor, dan Kepentingan

Sengketa wilayah Doklam pada tahun 2017 merupakan salah satu titik puncak ketegangan dalam hubungan antara Bhutan, India, dan Tiongkok. Wilayah ini merupakan titik krusial geopolitik karena menjadi perbatasan antara tiga negara tersebut. Konflik ini tidak hanya mencerminkan sengketa teritorial semata, tetapi juga menunjukkan bagaimana persaingan kekuatan besar, India dan Tiongkok, dapat mempengaruhi negara kecil seperti Bhutan dalam memelihara perdamaian kawasan Asia Selatan.

Doklam merupakan wilayah yang terletak di titik pertemuan tiga negara yaitu, Bhutan, Tiongkok, dan India. Secara geografis, wilayah ini merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh Lembah Chumbi, wilayah administratif Tibet, Tiongkok di sebelah utara, kemudian Lembah Ha, wilayah administratif Bhutan di sebelah Timur, dan sekitar 15 kilometer di sebelah barat, terdapat Nathu La, jalur pegunungan yang menjadi pembatas antara wilayah Sikkim, India dengan wilayah Yadong, Daerah Otonomi Tibet, Tiongkok (Beena, 2019).

Gambar 2.1 Peta Wilayah Doklam



Sumber: (BBC, 2023)

Lokasi strategis Doklam di persimpangan antara Bhutan, Tiongkok, dan India menjadikannya titik penting dalam dinamika geopolitik di kawasan Asia Selatan. Wilayah ini menjadi rawan konflik akibat klaim tumpang tindih antara Tiongkok dan Bhutan. Tidak hanya memicu ketegangan bilateral, Doklam juga menarik perhatian India untuk terlibat di dalam dinamika politik di kawasan ini.

Ketegangan di wilayah Doklam bermula ketika Tiongkok melakukan klaim atas wilayah tersebut. Untuk memperkuat legitimasi kepemilikan atas Doklam, Tiongkok menggunakan Konvensi Kalkuta 1890 yang disepakati antara Inggris Raya dan Dinasti Qing yang membahas mengenai batas wilayah Sikkim dan Tibet.

Dalam Pasal 1 menyatakan,

“The boundary of Sikkim and Tibet shall be the crest of the mountain range separating the waters flowing into the Sikkim Teesta and its affluent, from the waters flowing into the Tibetan Mochu and northwards into the rivers of Tibet. The line commences at Mount Gipmochi, on the Bhutan frontier and follows the abovementioned water-parting to the point where it meets Nepal territory” (Harrison dkk., 1894).

Konvensi tersebut tidak melibatkan Bhutan sebagai pihak yang berpartisipasi, sehingga penafsiran Tiongkok terhadap pembagian wilayah yang dimaksud berbeda dengan klaim historis yang diajukan oleh Bhutan. Oleh karenanya, Bhutan tidak mengakui interpretasi wilayah yang didasarkan pada klaim Tiongkok. Pembagian wilayah ini dapat di lihat pada peta di bawah, di mana garis merah menggambarkan klaim wilayah oleh Tiongkok, sementara garis kuning menunjukkan batas faktual antara Bhutan, Tiongkok, dan India.

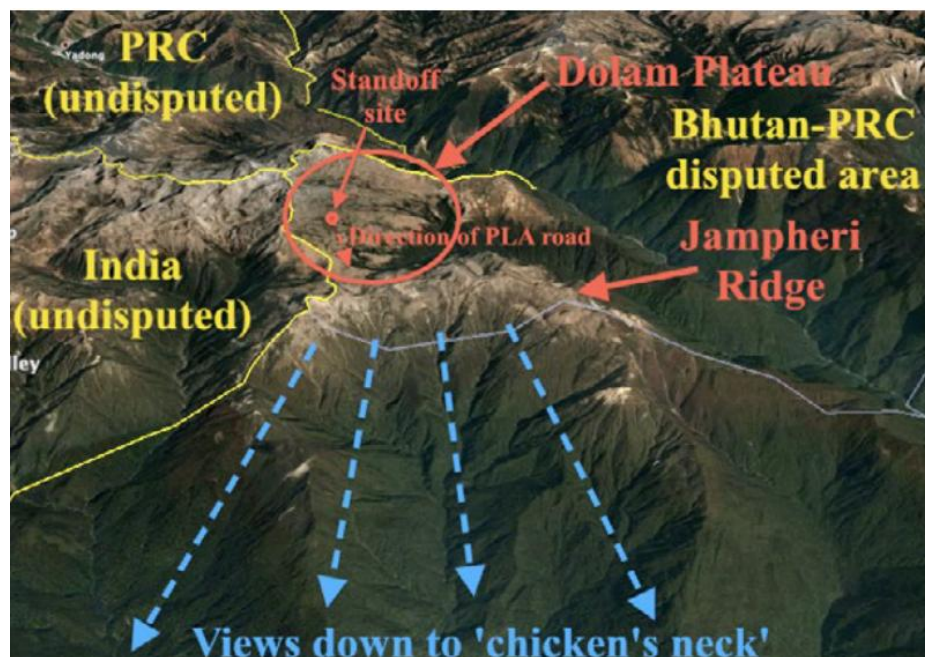
Gambar 2.2 Ilustrasi Perbedaan Klaim Teritorial di Wilayah Perbatasan Bhutan, Tiongkok, dan India



Sumber: (Nithiyanandam, 2023)

Pada gambar tersebut, wilayah Doka La terletak di bagian barat daya Doklam. Titik ini merupakan kawasan persimpangan yang menjadi pertemuan batas wilayah antara tiga negara. Di sebelah selatan, terdapat pegunungan Jampheri yang menjadi batas antara Bhutan dan India. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran keamanan bagi India, jika Tiongkok menguasai wilayah yang diklaimnya seperti yang terlihat pada peta tersebut. Pasalnya, wilayah Jampheri mengarah langsung ke Koridor Siliguri, yang dianggap India sebagai titik vital yang menghubungkan logistik India bagian timur laut dengan wilayah India lainnya (India Times, 2025). Gambaran situasi wilayah ini dapat diperjelas dengan gambar berikut.

Gambar 2.3 Pegunungan Jampheri



Sumber: (Andrew Chubb, 2018)

Gambar 2. 4 Koridor Siliguri



Sumber: (India Times, 2025)

Sebelum memahami fenomena kebuntuan militer Doklam 2017, perlu dipahami bahwa wilayah Doklam sendiri adalah wilayah tumpang tindih yang diakui oleh Tiongkok dan Bhutan. Melalui perjanjian Tiongkok-Bhutan tahun 1998, kedua negara sepakat untuk menjaga perdamaian dan ketenangan di kawasan perbatasan yang disengketakan (Ministry of Foreign Affairs The People's Republic of China, t.t.). Pada 16 Juni 2017, Tiongkok melakukan pembangunan jalan di wilayah Doklam, yang berdekatan dengan titik pertemuan tiga negara yaitu Doka La . India menanggapi pembangunan yang dilakukan Tiongkok akan mengubah status quo wilayah dan akan membawa dampak mengkhawatirkan bagi keamanan India (MEA India, 2017). Lebih lanjut pada 18 Juni 2017, India mengirimkan pasukan perbatasannya untuk menghentikan pembangunan jalan yang sedang dikerjakan oleh Tiongkok. Dalam hal ini, Tiongkok menilai India melakukan pelanggaran

perjanjian batas wilayah karena memasuki wilayah teritorial Tiongkok secara ilegal (WEForum, 2017).

Ketegangan antara Tiongkok dan India sudah terjadi sejak awal, namun Bhutan sebagai negara yang juga berkempentingan langsung atas klaim terhadap wilayah Doklam, baru memberikan tanggapan pada 20 Juni 2017. melalui situs Kementerian Luar Negeri, Bhutan menyampaikan pernyataan tindakan Tiongkok menyalahi perjanjian yang telah disepakati untuk menjaga perdamaian pada perbatasan negara, dan berharap Tiongkok akan menghentikan kegiatannya di wilayah tersebut untuk mempertahankan status quo Doklam (Ministry of Foreign Affairs and External Trade, 2017). Membantah pernyataan Bhutan yang menyatakan bahwa Tiongkok melakukan pembangunan di wilayah yang disengketakan, Tiongkok justru menyoroti sikap India yang seharusnya tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam hal ini (CNN, 2017b).

Ketegangan diantara Tiongkok maupun India, tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Kedua pihak malah memperkuat kehadiran pasukan di wilayah tersebut. Tiongkok tetap bersikukuh pada posisinya, sedangkan India juga tidak akan mundur (VOA, 2017). Ditengah ketegangan antara dua kekuatan besar, Bhutan tampak tidak memberikan tanggapan apapun. Setelah dua bulan kedua negara berada pada kebuntuan militer, akhirnya pada Agustus 2017, Tiongkok dan India sepakat untuk menarik pasukan mereka secara bertahap setelah melakukan negosiasi diplomatik intensif. India menarik pasukannya terlebih dahulu sebagai langkah meredakan ketegangan, sementara Tiongkok menyatakan akan tetap berpatroli di kawasan tersebut. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis, kedua negara pada akhirnya

sepakat untuk mempertahankan status quo dan menghindari eskalasi lebih lanjut sehingga ketegangan Doklam berhasil diredam untuk sementara waktu (BBC, 2017).

Bhutan kembali menyuarkan sikapnya setelah tercapai kesepakatan penarikan pasukan antara Tiongkok dan India terkait kebuntuan militer di wilayah Doklam. Bhutan menyambut baik penarikan pasukan dari kedua pihak di area sengketa tersebut. Bhutan berharap langkah ini dapat mendukung terjaganya perdamaian, stabilitas, serta mempertahankan status quo di sepanjang perbatasan Bhutan, Tiongkok, dan India, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh masing-masing negara (Ministry of Foreign Affairs and External Trade, 2017).

Bagi Bhutan, pertahanan klaim teritorial terhadap Doklam sangat penting bagi kedaulatannya. Kehilangan kontrol atas Doklam, akan menambah tantangan besar dalam mempertahankan kemerdekaannya di tengah persaingan antara India dan Tiongkok. Bagi Tiongkok, pembangunan jalan di Doklam adalah bagian dari upaya memperluas pengaruh dan konektivitasnya ke wilayah Asia Selatan. Bagi India, kawasan Doklam adalah wilayah sensitif bagi keamanan nasionalnya, apabila Tiongkok menguasai wilayah tersebut.